

Strategi *Sphere of Influence* Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi melalui Bali Democracy Forum (BDF)

Oktaria Mawarni¹
Anggun Puspitasari²

Abstract

This research aims to explain about Indonesia's sphere of influence strategy in promoting democracy to extend its influence and become the emerging power in region. This research uses qualitative method approach. This research uses country as analysis unit where Indonesia is an analysis unit and Bali Democracy Forum is an explanation unit. This research uses sphere of influence theory and enmeshing strategy to analyze it. This research has discovered that Indonesia implemented effective strategy to extend its influence and become the emerging power. By initiating Bali Democracy Forum, Indonesia has implemented the enmeshing strategy.

Keywords: *democracy promotion, enmeshing strategy, sphere of influence*

Pendahuluan

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak runtuhnya rezim Suharto pada Mei 1998 semakin terbuka lebar (Sukma, 2011: 110), terlebih saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin demokrasi di Indonesia menjadi isu domestik yang lebih dominan. Pada masa pemerintahan presiden Yudhoyono, Indonesia telah menjadikan promosi demokrasi sebagai sasaran utama agenda kebijakan luar negerinya. Indonesia telah memulai untuk mencapai peran besar dalam level global (Karim, 2016: 1). Selama kepemimpinan Presiden Yudhoyono, Indonesia tidak hanya bercita-cita untuk mengambil peran sebagai promotor demokrasi, Indonesia juga bercita-cita mengambil peran sebagai *bridge-builder* dan juga pemimpin regional.

Gagasan Indonesia sebagai *bridge-builder* menjadi sangat fundamental selama kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Sebagai negara demokratis Muslim terbesar, Indonesia berperan sebagai *bridge-builder* untuk menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang, negara-negara demokrasi dan negara-negara non-demokrasi, dan juga negara-negara Barat dan negara-negara mayoritas Muslim. Melalui peran ini, Presiden Yudhoyono berusaha memanfaatkan demokrasi Indonesia untuk merevitalisasi posisi Indonesia di tingkat regional dan global (Karim, 2016: 6).

Selama pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah berusaha untuk, memperluas *sphere of influence* (lingkup pengaruh) Indonesia ke dalam panggung internasional (The

¹ Mahasiswi S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. *E-mail:* oktamawar02@gmail.com

² Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

Diplomat, 2014). Dalam memperluas *sphere of influence*-nya Indonesia menjadikan institusi sebagai wadah dalam menyebarkan pengaruhnya. Dalam hal ini Bali Democracy Forum (BDF) hadir sebagai wadah yang digunakan Indonesia untuk menunjukkan keinginannya menjadi pemimpin dalam mempromosikan demokrasi.

BDF merupakan forum yang diselenggarakan tiap tahun antar-pemerintah pertama di Asia Pasifik yang fokus pada kerjasama regional dalam bidang demokrasi dan pembangunan politik (Karim, 2016: 10). BDF dipahami untuk memfasilitasi pembangunan institusi demokratis di regional (Brigg, 2016: 417). BDF mencerminkan prinsip politik luar negeri Indonesia, bebas-aktif, dan gagasan yang berhubungan dengan kebebasan, kerjasama dan internasionalisme. BDF menunjukkan adanya pragmatisme dan keseimbangan kebijakan luar negeri dalam berhubungan dengan regional dan kebebasan yang berlawanan dengan liberalisme Barat (Brigg, 2016: 418). BDF menekankan kepentingan kesetaraan, dialog yang membangun, saling menghormati dan memahami dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dan mempromosikan demokrasi di regional (Karim, 2016: 11). Bagi Indonesia, BDF merupakan bagian dari diplomasi publik Indonesia yang mencoba untuk menunjukkan pencapaian Indonesia dalam demokrasi dan juga mempromosikan dialog inklusif tentang demokrasi dengan tidak hanya mengundang negara-negara yang tidak demokratis tapi juga negara-negara yang terinspirasi untuk menjadi demokratis (Anwar, 2010: 136).

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang berjudul "Strategi *Sphere of Influence* Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi melalui Bali Democracy Forum (BDF)" penulis menggunakan negara sebagai tingkat analisa di mana Indonesia merupakan unit analisa. Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah Bali Democracy Forum yang merupakan wadah/sarana bagi Indonesia dalam mempromosikan demokrasi. Kemudian untuk menganalisa penelitian, penulis menggunakan konsep *sphere of influence* (lingkup pengaruh) dalam karangan Susanna Hast yang berjudul *Spheres of Influence in International Relations: History, Theory and Politics* dan strategi *enmeshing* karangan Evelyn Goh yang berjudul *Great Powers and Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshment, Balancing and Hierarchical Order*.

Konsep Sphere of Influence

Menurut Susanna Hast *sphere of influence* adalah:

"As a metaphor, sphere of influence attempts to explain a power relation which involves the influencing and the influenced powers, as well as the territories they occupy." (Hast, 2016: 7)

Dapat dipahami bahwa *sphere of influence* menjelaskan tentang suatu hubungan kekuatan (*power*) yang melibatkan kekuatan yang memengaruhi dan yang dipengaruhi, serta wilayah yang diokupasi oleh salah satu kekuatan. Namun, adanya batas-batas (*boundaries*) yang ada di wilayah dapat menyebabkan pelanggaran apabila suatu kekuatan tersebut tidak memedulikan garis-garis yang ditarik pada peta. Pelanggaran batas negara berarti pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara dan oleh sebab itu *sphere of influence* dapat menyebabkan isu keadilan (Hast, 2016: 8). Namun, Hast juga menambahkan bahwa *sphere of influence* dapat dilakukan dengan cara *soft power*, di mana *sphere of influence* tidak lagi membicarakan mengenai okupasi wilayah dan paksaan melainkan kemampuan untuk mendapatkan kepentingan dengan memikat atau memengaruhi lawan (Hast, 2016: 12).

Strategi Enmeshing

Menurut Evelyn Goh strategi *enmeshing* adalah:

“*Enmeshment*’ refers to the process of engaging with an actor or entity so as to draw it into deep involvement into a system or community, enveloping it in a web of sustained exchanges and relationships, with the eventual aim integration.” (Goh, 2005: 4)

Dari definisi Goh, dapat dipahami bahwa strategi *enmeshing* bertujuan untuk mengikutsertakan (*engage*) aktor agar terlibat ke dalam sistem atau komunitas, dan identitas aktor tersebut mungkin dapat berubah sehingga aktor yang menariknya mendapatkan integritas dan tatanan sistem yang lebih besar. Selain bertujuan untuk menarik aktor agar terlibat ke dalam sistem atau komunitas, strategi *enmeshing* juga bertujuan untuk menciptakan *sphere of influence* yang tumpang tindih di kawasan yang kompetitif namun bernilai positif. Idealnya, *enmeshing* akan mewujudkan stabilitas yang lebih besar di kawasan itu, karena *major powers* (kekuatan utama) di kawasan akan dapat saling mengawasi satu sama lain. Dalam hal ini, *enmeshment* adalah tentang *hedging* (memagari) terhadap adanya kemungkinan persaingan dan kekerasan antara *major powers* di kawasan dan agresi kekuatan besar terhadap negara-negara kecil. Bila dilihat secara konstruktif, negara-negara kecil ini berharap *major powers* akan menemukan bahwa mereka memiliki kepentingan bersama (Goh, 2006: 8).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mendeskripsikan promosi demokrasi yang dilakukan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, yaitu data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder yang bersumber dari buku *Bali Democracy Forum* yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta *website* resmi yang dapat dipertanggung jawabkan seperti <https://bdf.kemlu.go.id>, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, selain itu, penulis juga berpedoman pada buku *Spheres of Influence in International Relations: History, Theory and Politics* karangan Susanna Hast dan tulisan Evelyn Goh berjudul *Great Powers and Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshment, Balancing and Hierarchical Order*.

Pembahasan

Demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, adanya cita-cita para pendiri negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur menjadi landasan bahwa negara Indonesia harus dibangun menjadi negara yang demokratis (Tjakrawerdaja, 2016: 1). Mulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pemimpin ini menginginkan negara yang demokratis walaupun “demokratis” itu berdasarkan tafsiran mereka sendiri.

Walaupun demikian, patut diakui, setelah berakhirnya rezim Orde Baru, demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih baik. Terlebih saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin, promosi demokrasi menjadi isu yang lebih dominan bahkan menjadi agenda kebijakan luar negeri Indonesia (Karim, 2016: 1). Lebih lanjut, dalam usaha menyebarkan nilai-nilai demokrasi Indonesia rajin mengikuti forum regional dan bahkan pada tahun 2008 Indonesia menggagas forum mengenai demokrasi, yaitu Bali Democracy Forum (BDF) (Albayumi, 2014: 7).

Bali Democracy Forum merupakan forum setingkat kepala pemerintahan, menteri, dan tokoh-tokoh terkenal di Asia-Pasifik (IPD, 2013) sebagai wujud dari promosi

demokrasi yang dilakukan Indonesia. BDF sendiri merupakan forum pertama di Asia yang membahas demokrasi dengan cara bertukar pandangan dan berbagi pengalaman antar negara-negara peserta terkait demokrasi di negaranya sendiri (Wirajuda, 2014: 138). Tujuannya adalah untuk menciptakan forum regional yang mendorong pembangunan politik melalui dialog dan pertukaran pengalaman dan kerja sama internasional, guna memperkuat institusi demokrasi di kawasan. Selain itu juga untuk memulai suatu proses pembelajaran dan berbagi (*sharing*) di antara negara di kawasan sebagai strategi untuk mencapai terpeliharanya perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia dan sekitarnya (Kemlu, 2015).

Sebagai penggagas dan tuan rumah forum tahunan ini Indonesia sangat aktif dalam rangka menjaga demokrasi tetap berjalan di Indonesia dan sebagai cara untuk menunjukkan citra Indonesia sebagai negara demokrasi setelah reformasi (Albayumi, 2014: 2). Keinginan Indonesia dalam mengadopsi demokrasi dan mempromosikannya ke negara luar menjadi isu yang menarik bagi penulis untuk dibahas. Maka dari itu, jurnal ini akan membahas sekaligus menganalisa strategi Indonesia dalam mempromosikan demokrasi dengan menggunakan teori *sphere of influence* dan strategi *enmeshing*.

Promosi Demokrasi melalui Bali Democracy Forum

Bali Democracy Forum yang pertama kali diselenggarakan Indonesia pada tahun 2008 membuktikan keseriusan Indonesia dalam mempromosikan demokrasi ke negara luar. Melalui BDF, dapat dilihat adanya usaha Indonesia dalam menyebarkan pengaruhnya – demokrasi – dari Asia Tenggara sampai Asia-Pasifik (Karim, 2016: 11). Mengutip dari pernyataan Dewi Fortuna Anwar dalam karangannya yang berjudul *The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy*, BDF sendiri bagi Indonesia merupakan bagian dari diplomasi publik Indonesia yang dapat menunjukkan pencapaian Indonesia dalam demokrasi (Anwar, 2010: 136).

Penyelenggaraan BDF sendiri diberi sambutan baik oleh beberapa kepala pemerintahan yang hadir dari negara-negara seperti Australia, Brunei Darussalam, dan Timor-Leste. Walaupun pada awalnya banyak negara yang skeptis terhadap forum ini karena melihat forum ini adalah forum yang inklusif di mana negara-negara seperti Tiongkok dan Myanmar hadir ke dalam forum (Anwar, 2010). Padahal, sifat inklusif itulah yang membedakan karakteristik promosi demokrasi yang dilakukan Indonesia dengan negara Barat (Karim, 2016: 12). Namun seiring berjalannya waktu, minat negara-negara untuk menghadiri BDF semakin meningkat. Terlebih saat Indonesia mengundang partisipan BDF untuk meninjau pemilu presiden tahun 2009, hal ini diharapkan Indonesia dapat membantu terciptanya pemilu yang transparan dan adil yang pada akhirnya dapat diterima di Asia (Anwar, 2010: 136).

Melalui BDF negara-negara peserta dapat bertukar pikiran, berdialog, dan memecahkan berbagai hambatan mengenai demokrasi (Yudhoyono, 2010). Melalui BDF, Indonesia telah menunjukkan bahwa promosi demokrasi bukan agenda eksklusif negara-negara Barat. BDF mampu menyediakan *platform* alternatif untuk membahas pentingnya membangun demokrasi *home-grown* yang berdasarkan pada tradisi dan nilai-nilai yang tidak berasal dari Barat (Karim, 2016: 13). Terlebih, tema yang diangkat BDF setiap tahunnya pun selalu menarik dan dekat dengan kebutuhan masyarakat internasional (Detiknews, 2013).

Berdasarkan teori *sphere of influence* yang menyatakan bahwa *sphere of influence* pada era kontemporer ini dapat dilakukan dengan cara *soft power*, di mana *sphere of influence* tidak lagi membicarakan mengenai okupasi wilayah dan paksaan melainkan kemampuan untuk mendapatkan kepentingan dengan memikat atau memengaruhi

lawan, maka keinginan Indonesia untuk mempromosikan demokrasi memiliki korelasi dengan teori *sphere of influence* dimana Indonesia berusaha untuk memengaruhi negara lain agar mendapatkan kepentingannya, yaitu dengan mendorong negara-negara lain menjadi lebih demokratis melalui Bali Democracy Forum. Indonesia mendorong negara-negara partisipan untuk memelihara demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di negara masing-masing (Wirajuda, 2014: 139).

Terletak di kawasan strategis Asia-Pasifik yang terdiri dari negara-negara berpengaruh dalam ekonomi dan militer dan dianggap sebagai pusat strategis tatanan dunia di abad ke-21, membuat Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia-Pasifik. Dengan mengembangkan hubungan yang erat dapat memperkuat peran dan eksistensi Indonesia dalam regional dan mengembangkan peran lebih besar dalam tatanan dunia dan pemerintahan global (Acharya, 2014: 75). Dengan demikian, Indonesia dapat membantu perkembangan stabilitas internal yang mana membantu pembangunan ekonomi Indonesia, membantu legitimasi sistem politik, dan konsolidasi demokrasi (Acharya, 2014: 19-20).

Penyebaran Agenda BDF melalui IPD

Dalam mengimplemantasikan agenda-agenda BDF, IPD telah melaksanakan kerja sama dengan beberapa negara untuk memelihara dan mengkonsolidasikan demokrasi. Melalui IPD, BDF telah menyelenggarakan dan memberikan kontribusi bagi berbagai kegiatan regional dan internasional (Tabloid Diplomasi, 2012). Berikut merupakan bentuk kerja sama IPD dengan beberapa negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

Kerja sama IPD dengan CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)

Sebelum bekerja sama dengan negara-negara CLMV, IPD terlebih dahulu melakukan *scoping missions* (pelingkupan misi) dengan negara-negara tersebut. Setelah melakukan *scoping missions* dengan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, IPD mengundang perwakilan *think-tank* dan institusi pemerintah dari CLMV ke dalam *workshop* yang diselenggarakan pada 10-11 April 2014. Partisipan *workshop* juga diundang untuk mengobservasi proses pengecekan suara di TPS (tempat pemungutan suara) di sekitar Badung, Bali selama pemilu (pemilihan umum) Parlemen Indonesia pada April 2014.

Menurut Laporan Program Komprehensif IPD tahun 2014, pada kesempatan *workshop* ini Myanmar mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan publik telah meningkat sejak reformasi dilakukan. Anggaran negara pun telah bergeser dari militer ke sektor lain. Myanmar juga memulai reformasi layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara perwakilan dari Vietnam mengatakan bahwa pemerintah Vietnam telah membangun kebijakan untuk mendorong partisipasi publik dan non-publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, budaya, olahraga, lingkungan, dan infrastruktur (IPD, 2014).

Lebih lanjut, dalam rangka melanjutkan kerja sama dengan negara-negara CLMV, pada tanggal 17-18 Maret 2015 IPD dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) bekerja sama dengan Kemenlu Myanmar dan Myanmar Institute for Strategic and International Studies (MISIS) mengadakan *workshop* yang bertema "*Sharing Experiences on Development Institutions: Can Decentralization Bring Peace, Democracy, and Local Development?*" di Yangon, Myanmar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program komprehensif IPD tentang *Building and Consolidating State Institution Reform in Southeast Asia: Sharing Experiences, Developing Capacity and Supporting Initiatives of Indonesia and Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam* (Membangun dan mengkonsolidasi reformasi institusi negara di Asia Tenggara: berbagi

pengalaman, membangun kapasitas dan mendukung inisiatif Indonesia dan CLMV) yang didanai oleh pemerintah Denmark.

Workshop ini dihadiri oleh para akademisi, pembuat kebijakan, dan karyawan pemerintah dari Myanmar, Indonesia, Laos, dan Vietnam. Di hari pertama, *workshop* ini fokus pada tantangan desentralisasi. Tim dari Indonesia mempresentasikan beberapa tantangan dalam desentralisasi di Indonesia seperti amandemen undang-undang dan proses implementasinya. Pada hari kedua *workshop* ini membicarakan studi kasus dan solusi alternatif yang mungkin akan diadopsi negara-negara untuk menjadikan desentralisasi lebih fundamental.

Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat kerja sama, IPD mengadakan pertemuan penelitian (*research meeting*) antara Indonesia dan CLMV pada 19 Maret 2015 di Yangon, Myanmar. Pertemuan tersebut berlangsung di MISIS. Pertemuan ini mendiskusikan metodologi, laporan akhir, mekanisme, tahap penelitian, kerangka waktu, dan pembiayaan. Dalam pertemuan ini telah disepakati bahwa desentralisasi akan menjadi payung kegiatan penelitian (*umbrella of the research activity*). Para peneliti akan melihat tema spesifik yang diharapkan oleh negara-negara yang terkait dengan proses desentralisasi seperti kesetaraan *gender* dan keterlibatan perempuan (Laos), reformasi administratif dan parlementer (Vietnam), desentralisasi dan pembangunan perdamaian (Myanmar) (IPD, 2015).

Pada tahun berikutnya IPD bekerja sama dengan Institute for Southeast Asia Studies (ISEAS) dalam sebuah penelitian selama sembilan bulan (April-Desember 2016) tentang "Reformasi Administrasi Publik di Vietnam 2001-2020: Prospek dan Situasi saat ini". ISEAS melakukan penelitian di Vietnam yang berfokus pada akuntabilitas negara di tingkat regional. Proyek ini bertujuan untuk menguji reformasi administrasi publik yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Penelitian ini termasuk kedalam bagian dari reformasi, prestasi, keterbatasan reformasi, serta prospek reformasi. Hasil penelitian ini akan dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan.

Penelitian ini dikaji berdasarkan perkembangan Vietnam's Master Plan of Public Administrative Public 2001-2010 dan 2010-2020. Penelitian akan memberikan kontribusi yang signifikan karena alasan berikut. Pertama, reformasi administrasi merupakan salah satu bidang strategi reformasi yang paling penting di setiap negara selain reformasi ekonomi dan reformasi politik. Kedua, reformasi administrasi berhubungan langsung dan berdampak pada bidang reformasi lainnya. Keberhasilan reformasi ekonomi dan politik sangat bergantung pada hasil reformasi administrasi. Ketiga, dalam konteks Vietnam, administrasi publik memainkan peran penting dalam ekonomi, politik, dan fungsi lainnya di negara ini. Terakhir, dalam konteks integrasi regional dan internasional, terutama ketika ASEAN Community direalisasikan pada akhir tahun 2015, administrasi publik Vietnam harus diintegrasikan dan kompatibel dengan negara anggota ASEAN lainnya (Institute for Peace and Democracy, 2016).

Kerja sama IPD dengan Mesir

Setelah pelaksanaan BDF IV, IPD menciptakan beberapa program untuk memberikan dukungan proses demokrasi di Mesir. Dalam melaksanakan programnya IPD lebih dahulu membentuk *scoping mission* (misi pelingkupan) (IPD, 2013). Kemudian IPD mengadakan *workshop The Egypt-Indonesia Dialogue on Democratic Transition*. *Workshop* ini membahas mengenai peran militer, pemerintahan, reformasi politik, agama, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memajukan dan mengkonsolidasikan demokrasi di Mesir. Dalam *workshop* ini para partisipan juga diberi kesempatan untuk berdialog dan berbagi pengalaman (Institute for Peace and Democracy, 2011).

Setelah menggelar *workshop* pertama, untuk menunjukkan keefektifannya IPD menggelar *workshop* lainnya dengan tema *Building Electoral Democracy in Egypt. Lessons Learned from the Indonesian Experience*. *Workshop* kedua ini fokus kepada pemilu yang akan diadakan di Mesir. Para partisipan sangat antusias mengikuti *workshop* ini, salah satu partisipan mengatakan bahwa IPD telah mengubah suasana hati mereka sejak mengadakan *workshop* pertama. Lebih lanjut, dalam *workshop* ini Indonesia berbagi pengalaman dalam menjalankan dan mengelola partai politik (Institute for Peace and Democracy, 2011).

Setelah menggelar beberapa *workshop* IPD fokus terhadap *empowering the Electoral Management Body* (EMB) yang mana memberikan pelatihan (*training*) dan *workshop* yang bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap hukum dan model pemilu serta pengelolaan pemilu, kompetisi politik, hak-hak politik dan *voting*, pengelolaan konflik selama pemilu, dan pengawasan pemilu (Institute for Peace and Democracy, 2011).

Lebih lanjut, pada tanggal 1-4 Maret 2015, IPD diundang kedalam *workshop* yang membahas pemilu legislatif di Kairo. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dan Al Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS) mengadakan "*International Workshop on Legislative Election: Indonesia's Experiences*" yang diselenggarakan di ACPSS pada 3 Maret 2015. *Workshop* ini dihadiri oleh anggota partai politik, akademisi, para ahli, pelajar, dan jurnalis. *Workshop* ini bertujuan untuk berbagi pengalaman Indonesia dalam pemilu legislatif sebagaimana Mesir siapkan untuk melaksanakan pemilu legislatif yang menjadi pilar terakhir dari transisi demokrasi Mesir setelah amandemen konstitusi tahun 2012 dan pemilihan presiden (IPD, 2015).

Kerja sama IPD dengan Tunisia

Hubungan antara Indonesia dan Tunisia sudah terjalin lama bahkan sebelum Tunisia mendapatkan kemerdekaan dari Perancis di tahun 1956. Pejuang kemerdekaan Tunisia, Habib Bourguiba sebelumnya pernah mengunjungi Jakarta pada tahun 1951 yang kemudian dari kunjungan tersebut menghasilkan dukungan kemerdekaan untuk Tunisia dengan melobi negara-negara di Asia agar mendukung perjuangan Tunisia untuk merdeka. Kemudian pada tahun 1960 Indonesia membuka kantor kedutaan di Tunisia. Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Tunisia inilah yang menjadikan kedua negara ini memiliki hubungan yang kuat.

Dukungan lain yang Indonesia berikan yaitu menggelar *workshop* yang dilaksanakan oleh IPD saat transisi demokrasi di Tunisia berlangsung (The Diplomat, 2017) mengenai "*Indonesia-Tunisia Capacity Building Partnership for Democracy: Dialogue on Empowering the Electoral Management Body*" pada tanggal 10-16 Mei 2013. *Workshop* ini didukung oleh Kemenlu RI, Kemenlu Tunisia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tunis, Kedutaan Besar Tunisia di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, dan AusAid. *Workshop* ini dihadiri oleh 14 partisipan dari Tunisia yang mewakili Kemenlu, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum Transnasional, Majelis Konstituante Nasional Tunisia, Kantor Kepresidenan, Persatuan Tenaga Kerja Tunisia, Amnesty Internasional, dan media.

Workshop ini mendiskusikan empat topik mengenai pemilu dengan integritas dimana topik ini membahas mengenai logika hubungan antara pemilu dan demokrasi; pengaturan pemilu, topik ini membahas pandangan dasar hukum untuk mengatur pemilu seperti prinsip, sistem, dan pemerintahan; konteks politik: Islam, militer, dan lokalitas, dimana topik ini membahas keterlibatan agama (nilai-nilai, institusi, dan politik) dalam membentuk dinamika pemilu lokal dan umum; partisipasi publik, dimana topik ini

berusaha untuk melibatkan publik dalam meningkatkan praktik pemahaman terhadap pemilu (IPD, 2013).

Lebih lanjut, saat Tunisia melaksanakan pemilu di tahun 2014, Indonesia mengucapkan selamat dan mendukung Tunisia. Eratnya hubungan antara Indonesia-Tunisia ini terus berlanjut terlebih saat Tunisia menyelenggarakan Bali Democracy Forum Chapter Tunisia di Tunis pada 2 Oktober 2017 dengan tema "*Homegrown Democracy: The North Africa Experience*". BDF Chapter Tunis ini menjadi ajang dialog dan pertukaran *best practices* bagi pemajuan *homegrown democracy* serta berkontribusi pada pematangan demokrasi dan stabilitas kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Kemlu, 2017).

Dari bentuk kerja sama antara IPD dengan negara CLMV, Mesir dan Tunisia terdapat korelasi dengan strategi *enmeshing* yang penulis deskripsikan di BAB I yang menjelaskan bahwa *enmeshing* bertujuan untuk mengikutsertakan aktor agar terlibat ke dalam sistem atau komunitas. Dari bentuk kerja sama ini dapat dilihat bahwa Indonesia sedang berusaha untuk melibatkan negara-negara lain agar masuk ke dalam IPD dengan memberikan seminar, *workshop*, dan *training* kepada negara-negara peserta BDF. Sehingga, Indonesia dalam menyebarkan *sphere of influence*-nya tidak harus menggunakan kekerasan, melainkan dengan mengumpulkan negara-negara yang tergabung dalam BDF untuk bekerjasama dengan Indonesia secara lebih lanjut dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, sebagai negara demokratis Muslim terbesar yang berkeinginan menjadi *bridge-builder*, Indonesia telah menunjukkan kesuksesan dalam demokrasi. Indonesia telah menjadi negara demokratis Muslim yang negara-negara Barat dan negara-negara non-Barat merasa nyaman untuk menjalin hubungan – Indonesia demokratis, plural, dan telah berhasil mengatasi ekstrimis Islam (BBC, 2008). Oleh sebab itu, keberhasilan Indonesia inilah yang dilihat negara seperti Tunisia untuk menjadi contoh bahwa negara yang bermacam suku bangsanya dan bermacam pula agamanya dapat menjadi negara yang demokratis.

Kesimpulan

Pada masa kepemimpinan Presiden Yudhoyono, Indonesia berusaha untuk mempromosikan demokrasi dengan mencapai peran besar dalam level global. Indonesia bukan hanya bercita-cita sebagai promotor demokrasi tapi juga sebagai pemimpin regional. Selama pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah berusaha untuk, memperluas lingkup pengaruh (*sphere of influence*) Indonesia ke dalam panggung internasional. Oleh sebab itu, dalam usaha menyebarkan pengaruhnya, dalam hal ini demokrasi, Indonesia rajin mengikuti forum regional dan bahkan pada tahun 2008 Indonesia menggagas forum mengenai demokrasi, yaitu Bali Democracy Forum Inisiatif (BDF).

Melalui BDF, Indonesia berusaha menciptakan mekanisme regional untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Melalui BDF pula Indonesia sedang mewujudkan cita-citanya sebagai promotor demokrasi dan *bridge-builder*. Didukung dengan analisa menggunakan teori *sphere of influence* dan strategi *enmeshing*, dapat dilihat bahwa Indonesia sedang berusaha mempromosikan demokrasi dengan menjalankan agenda-agenda BDF melalui IPD, seperti melakukan *scoping missions*, memberikan seminar, dan training ke negara CLMV, Mesir, dan Tunisia.

Referensi

- Acharya, Amitav. (2014). *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Albayumi, Fuat. (2014). *Peran Bali Democracy Forum (BDF) dalam Demokrasi Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Anwar, Dewi Fortuna. (2010). "The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy". *Institute of Southeast Asian Studies*.
- BBC, (28 Februari 2008). "Indonesia: Muslim bridge-builder?". <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7269017.stm>. Diakses 9 Februari 2018.
- Brigg, Morgan *et. al.* (2016). "Diversity, Democratisation and Indonesian Leadership". *Australian Journal of International Affairs*.
- Detiknews. (6 November 2013). "Bali Democracy Forum, Kebutuhan Nasional dan Internasional". <https://news.detik.com/berita/2405453/bali-democracy-forum-kebutuhan-nasional-dan-internasional>. Diakses 6 Februari 2018.
- Goh, Evelyn. (2005). "Great Powers and Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshment. Balancing and Hierarchical Order". *Institute of Defence and Strategic Studies Singapore*.
- Hast, Susanna. (2016). *Spheres of Influence in International Relations: History, Theory and Politics*. New York: Routledge.
- Instituteforpeaceanddemocracy*. (19 Oktober 2016). "Research and Dialogue on Building Consolidating State Institutional Reform". <http://www.ipd.or.id/research-and-dialogue-on-building-and-consolidating-state-institutional-reform.htm>. Diakses 9 Februari 2018.
- Instituteforpeaceanddemocracy*. (20 Oktober 2011). "Third IPD Workshop – Empowering the Electoral Management Bodies of Egypt and Indonesia". <http://www.ipd.or.id/third-ipd-workshop-empowering-the-electoral-management-bodies-of-egypt-and-indonesia.htm>. Diakses 3 Januari 2018.
- Instituteforpeaceanddemocracy*. (25 Mei 2011). "First IPD Workshop – Egypt-Indonesian Dialogue on Democratic Transition". <http://www.ipd.or.id/first-ipd-workshop-indonesia-dialogue-on-democratic-transition.htm>. Diakses 3 Januari
- .Instituteforpeaceanddemocracy*. (26 Juli 2011). "Second IPD Workshop – Building Electoral Democracy in Egypt. Lessons Learned from the Indonesian Experience". <http://www.ipd.or.id/second-ipd-workshop-building-electoral-democracy-in-egypt-lessons-learned-from-the-indonesian-experience.htm>. Diakses 3 Januari 2018.
- IPD. 2013. Report: Comprehensive Program Report 2013. <http://www.ipd.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Comprehensive-Program-Report-2013.pdf>. Diakses 9 Februari 2018. IPD. 2015. Report: Comprehensive Program Report 2015. <http://www.ipd.or.id/wp-content/uploads/2015/12/Report%202015%20%20revision.pdf>. Diakses 9 Februari 2018.
- IPD. 2014. Report: Comprehensive Program Report 2014. <http://www.ipd.or.id/wp-content/uploads/2015/12/ComprehensiveProgramReport2014.pdf>. Diakses 9 februari 2018.
- Kemlu*. (2 Oktober 2017). "Homegrown Democracy, The North Africa Experience merupakan Tema Bali Democracy Forum Chapter Tunisia". <https://www.kemlu.go.id/tunis/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Homegrown-Democracy,-The-North-Africa-Experience-Merupakan-Tema-Bali-Democracy-Forum-Chapter-Tunisia.aspx>. Diakses 9 Februari 2018.
- Sukma, Rizal. (2011). "Do New Democracies Support Democracy?: Indonesia Finds a New Voice". *Journal of Diplomacy*.

Strategi Sphere of Influence Indonesia dalam Mempromosikan Demokrasi melalui Bali Democracy Forum (BDF)

Tabloiddiplomasi. (23 Januari 2012). "Bali Democracy Forum Menjadi Bagian Penting dari Arsitektur Demokrasi di Kawasan Asia Pasifik". <http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2012/01/23/bali-democracy-forum-menjadi-bagian-penting-dari-arsitektur-demokrasi-di-kawasan-asia-pasifik/>. Diakses 5 Februari 2018.

TheDiplomat. (7 November 2017). "Indonesia-Tunisia Relations: From Trade to Democracy". <https://thediplomat.com/2017/11/indonesia-tunisia-relations-from-trade-to-democracy/>. Diakses 9 Februari 2018.

Tjakrawerdaja, Subiakto *et. al.* (2016). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Universitas Trilogi.

Wirajuda, Muhammad Hadianto. (2014). "The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management". *The London School of Economics and Political Science*.

Yudhoyono, Susilo Bambang. (9 Desember 2010). *Bali Democracy Forum III: Democracy and the Promotion of Peace and Stability*. Pidato disampaikan dalam acara Bali Democracy Forum, Bali.